



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1924/PI.05/01-40/03/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Surat Pemberitahuan

21 Maret 2025

Yth.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta nama Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai KPK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami memandang perlu untuk mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kerap dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, antara lain:

1. Membuat surat, kartu identitas, atau dokumen lain yang mencatut nama KPK untuk menipu korban;
2. Penipuan melalui telepon dan media sosial yang mengaku sebagai Pegawai KPK dan meminta uang atau data pribadi dengan dalih menangani perkara;
3. Mengaku sebagai Penyidik KPK yang sedang menangani suatu kasus dan meminta sejumlah uang agar kasus tersebut dihentikan;
4. Pembuatan dan penggunaan seragam, lencana, serta atribut berlogo KPK yang digunakan untuk menipu atau mengintimidasi korban;
5. Mengatasmakan lembaga atau organisasi sebagai mitra resmi KPK untuk menggalang dana atau menawarkan bantuan hukum palsu;
6. Penipuan dengan menawarkan lowongan kerja palsu di KPK dan meminta biaya administrasi.

Untuk menghindari modus-modus penipuan tersebut, berikut beberapa ketentuan resmi terkait operasional KPK:

1. Dalam menjalankan setiap penugasan, Pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK;
2. Pegawai KPK **dilarang** menjanjikan/menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun;
3. Adalah tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa **“mengurus”** suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK dan/atau terkait perkara lainnya;
4. KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai **“perpanjangan tangan”** maupun perwakilan dari KPK dalam penanganan perkara;
5. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK;
6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah;

7. Saat ini situs resmi yang dikelola dan digunakan oleh KPK adalah sebagaimana terlampir;
8. Perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cuma-cuma (gratis);
9. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat ***tidak dipungut biaya*** atau ***gratis***.

Jika menemukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, segera laporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau kepada KPK melalui:

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM)

Gedung Merah Putih KPK

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

Call Center KPK – 198

<https://www.kws.kpk.go.id>

WhatsApp : 0811 959 575

E-Mail : pengaduan@kpk.go.id

Mohon dapat kiranya pemberitahuan ini disebarluaskan kepada jajaran di Instansi Saudara. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan,

Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyanto

Ketua

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Jaksa Agung Republik Indonesia

Lampiran Surat:
Nomor : B/1924/Pl.05/01-40/03/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

DAFTAR SITUS RESMI YANG DIKELOLA DAN DIGUNAKAN OLEH KPK

No	Nama Situs	Link	Keterangan
1	Website KPK	https://www.kpk.go.id	Situs kelembagaan yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja KPK
2	Jaga	https://jaga.id/	Situs untuk memantau upaya pencegahan korupsi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi di Indonesia
3	GOL	https://gol.kpk.go.id/	Situs terkait pelaporan gratifikasi yang dapat diakses publik secara online
4	ACLC	https://aclc.kpk.go.id/	Situs yang digunakan sebagai portal pembelajaran antikorupsi
5	LHKPN	https://elhkpn.kpk.go.id/	Situs pelaporan dan untuk mengakses pengumuman laporan harta kekayaan milik Penyelenggara Negara
6	PPID	https://ppid.kpk.go.id/	Situs yang digunakan untuk mengakses pelayanan informasi publik KPK
7	KWS	https://kws.kpk.go.id/	Situs untuk melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi kepada KPK
8	STRANAS PK	https://stranaspk.id/	Situs yang menyajikan informasi terkait kegiatan dan kinerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
9	LSP KPK	https://lsp.kpk.go.id/	Situs mengenai sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh KPK
10	Perpustakaan	https://perpustakaan.kpk.go.id/	Situs yang menyajikan literasi digital di bidang korupsi yang dapat diakses publik
11	Jurnal	https://jurnal.kpk.go.id/	Situs yang menyajikan informasi dan publikasi terkait jurnal antikorupsi
12	Dewas	https://dewas.kpk.go.id	Situs yang menyajikan informasi terkait kegiatan dan kinerja dari Dewan Pengawas KPK
13	JDIH	https://jdi.h.kpk.go.id/	Situs yang menyajikan dokumentasi dan informasi hukum KPK yang dapat diakses publik
14	Aksesku	https://aksesku.kpk.go.id	Situs yang menyajikan terkait informasi mengenai pelatihan antikorupsi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI)
15	E-Learning	https://newlearning.kpk.go.id/	Situs yang menyajikan kursus dan media pembelajaran antikorupsi secara online

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyanto

Ketua